

TESIS

**IMPLIKASI STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA
NUSANTARA PADA REGULASI KEUANGAN NEGARA**



OLEH

NURWIDYA KUSMA WARDHANI

2310622009

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL

TESIS

**IMPLIKASI STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA
NUSANTARA PADA REGULASI KEUANGAN NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Megister

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH
NURWIDYA KUSMA WARDHANI
2310622009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURWIDYA KUSMA WARDHANI

NIM : 2310622009

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“IMPLIKASI STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PADA REGULASI KEUANGAN NEGARA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



NURWIDYA KUSMA WARDHANI

NIM. 2310622009

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwidya Kusma Wardhani

NIM : 2310622009

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“IMPLIKASI STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PADA REGULASI KEUANGAN NEGARA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and the serial number '3BBE3AMX150953982'.

Nurwidya Kusma Wardhani

NIM. 2310622009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Implikasi Status Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
Pada Regulasi Keuangan Negara**

Disusun dan diajukan oleh:

Nurwidya Kusma Wardhani

NIM. 2310622009

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 30 Juni 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri., S.H., M.H

NIDN. 000205602

Pembimbing 2

Mas Pungky Hendra Wijaya, S.H., LL.M., Ph.D.

NIDN. 8950350022

**Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister**

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

NIP. 196806081994032001

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 30 Juni 2025



Implikasi Status Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Pada Regulasi Keuangan Negara

**Nurwidya Kusma Wardhani^{1*}, Taufiqurrohman Syahuri², Mas Pungky Hendra
Wijaya³**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia³

Corresponding Email: widkusma@gmail.com*

Abstract

Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur membuat banyak sektor mengalami perubahan. Baik di sektor pemerintahan, sektor sosial, maupun sektor ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan berbagai sektor yang selama ini hanya berpusat di wilayah Pulau Jawa. Pemerataan tersebut hingga ke wilayah timur Indonesia memungkinkan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan ke wilayah timur Indonesia yang selama ini dianggap masih tertinggal dibandingkan wilayah barat Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2022 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 akan dikaitkan dengan penetapan status pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Penulis ingin menganalisis bagaimana implikasi status pemerintahan daerah khusus yang ada di IKN dengan sistem keuangan negara yang tentunya dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Metode penelitian yuridis normatif akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini akan berdampak pada keterkaitan antara penetapan pemerintahan daerah khusus dengan regulasi keuangan negara yang seharusnya dimiliki oleh Ibu Kota Negara di masa yang akan datang. Serta dapat menjadi pedoman untuk menjalankan keuangan yang baik di kawasan timur Indonesia.

Keywords: Ibu Kota Negara, Pemerintahan Khusus, Keuangan Negara

Implications of the Status of the Special Capital Region of the Nusantara on the State Financial Regulation

**Nurwidya Kusma Wardhani^{1*}, Taufiqurrohman Syahuri², Mas Pungky Hendra
Wijaya³**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia³

Corresponding Email: widkusma@gmail.com*

Abstract

The relocation of the national capital from Jakarta to East Kalimantan has changed many sectors. Both in the government sector, social sector, and economic sector. This is done as a form of equalization of various sectors which have only been centered in the Java Island region. The equalization to the eastern region of Indonesia allows sustainable development to be carried out to the eastern region of Indonesia, which has been considered underdeveloped compared to the western region of Indonesia. Law No. 3 of 2022 and Law No. 17 of 2003 will be associated with the determination of the special regional government status of the National Capital. The author wants to analyze how the implications of the special regional government status in IKN with the state financial system are certainly associated with Law (UU) Number 21 of 2023 concerning Amendments to Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The normative juridical research method will be studied with a statutory approach, comparative approach and conceptual approach. The results of this study will have an impact on the relationship between the establishment of a special regional government and the state financial regulation that should be owned by the State Capital in the future. And can be a guideline for running good finance in eastern Indonesia.

Keywords: National Capital, Special Government, State Finance

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis sesuai dengan yang penulis inginkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis yang berjudul “Implikasi Status Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara pada Regulasi Keuangan Negara” tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua saya Kusnan Nasirun, dan Diah Nurkhotimah, serta kedua saudara saya : Ima Kusdiana Kurnia Sari dan adik saya : Nurdiana Rahma Yuni Asri. Serta Kakak Ipar Irvan Novianto dan Ponakan Fania Kurnia Putri.
2. Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
3. Dr. Suherman., S.H., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
4. Dr. Atik Winanti., S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
5. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I saya, atas segala bimbingan, masukan dan pendapatnya

6. Mas Pungky Hendra Wijaya, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dosen Pendamping II saya, atas segalabimbingan, masukan dan pendapatnya
7. Prof. Dr. Wicipto Setiadi., S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan juga penguji I saya, terima kasih atas segala masukannya.
8. Dr. Ahmad Ahsin Thohari., S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan juga penguji II saya, terima kasih atas segala masukannya.
9. Semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, atas semua bantuan, ajaran, bimbingan, nasehat, masukan dan arahan yang membawa saya menjadi mahasiswa yang dapat membanggakan semua pihak
10. Semua staf yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atas bantuan serta keramahannya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
11. Instansi tempat penulis melakukan wawancara tesis, antara lain: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda), Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran), Dr. Diani Sadia Wati., S.H., LL.M selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan Ketua Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan IKN.
12. Teman-temanku semua satu alumniku, dari TK-Kuliah. TK Baitul Makmur Dau Malang, SDN Percobaan I Malang, SMP Negeri 13 Malang, SMA

Negeri 2 Malang, S1 Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 Cohort XI 2019 Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI, S2 Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

13. Terkhusus seluruh teman saya baik di lingkungan pekerjaan antara Fakultas Kedokteran Unhan RI, Universitas Pertahanan RI, rekan-rekan media dan jurnalis Malang Raya, hingga teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis memohon maaf yangsebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Jakarta, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENULISAN	7
1.4 MANFAAT PENULISAN	8
1.5 ORISINALITAS PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 KAJIAN TEORITIS	11
2.2 KERANGKA PIKIR ATAU BAGAN KERANGKA PIKIR	19
2.3 DEFINISI OPERASIONAL	21
BAB III METODE PENULISAN	22
3.1 JENIS PENULISAN.....	22
3.2 PENDEKATAN PENULISAN	23

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA / BAHAN HUKUM	27
3.4 ANALISA DATA / BAHAN HUKUM	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 PERBEDAAN STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DI INDONESIA DENGAN STATUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IKN DALAM KEUANGAN NEGARA.....	34
4.2 PERBANDINGAN REGULASI KEUANGAN NEGARA YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 UNTUK PEMERINTAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA TERUTAMA DI SISI APBIKN DAN BMO	92
BAB V PENUTUP	123
5.1 KESIMPULAN	123
5.2 SARAN	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130

DAFTAR GAMBAR

KERANGKA BERFIKIR	20
BAGAN PENERIMAAN NEGARA	79
BAGAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	84
BAGAN PENGELUARAN NEGARA	85
SIKLUS APBN	88
SIKLUS PENYUSUNAN APBN	89
BAGAN PENGELOLAAN KEUANGAN IKN	101
APBIKN	106
PEMBIAYAAN IKN	110
PENGELOLAAN BMN	113
KONSEP ADP	118

DAFTAR TABEL

PENELITIAN TERDAHULU	9
PERBEDAAN PEMDASUS INDONESIA DAN PEMDASUS IKN ...	42
ALASAN PERPINDAHAN IKN	49
DAFTAR PEJABAT DI OTORITA IKN	55